



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 162 /KEP/412.11/2016**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tercapainya tertib administrasi dalam pelaksanaan penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, perlu dilakukan kegiatan penghapusan yang dilaksanakan oleh panitia pelaksana;
 - b. bahwa dengan adanya ketentuan baru yang mendasari pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/107/KEP/412.11/2012 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penghapusan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/107/KEP/412.11/2014, perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penghapusan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Oleh karena Panitia Pelaksana Kegiatan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugasnya sejak tanggal 4 Januari 2016, maka segala bentuk pembiayaan operasional dan/atau honorarium tim termasuk dalam pembebanan biaya yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

- KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/107/KEP/412.11/2012 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penghapusan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/107/KEP/412.11/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 13 Mei 2016



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; dan
4. Sdr. Anggota Panitia Pelaksana Kegiatan Penghapusan yang bersangkutan.
-

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro.
2.	Penanggung Jawab	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro.
3.	Ketua	Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro.
5.	Anggota:	a. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; b. Kepala Bidang Akuntansi, Investasi dan Pengelolaan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; c. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; d. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pengelolaan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; dan e. 5 (lima) orang Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**

H. SUYOTO